

**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
EXPERTS MEETING
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI**

**SCENARIO PLANNING
REFORMASI BIROKRASI**

Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM

**Guru Besar Ilmu Pemerintahan – UMM
Wakil Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia**

APA ITU SCENARIO PLANNING ?

GAMBARAN TENTANG BERBAGAI KEMUNGKINAN YANG TERJADI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI FAKTOR LUAR YANG BERPENGARUH

SCENARIO PLANNING BERISI ALTERNATIF ALTERNATIF JALANN KELUAR YANG KONSISTEM BILA SUATU KEADAAN TERJADI.

DALAM HAL INI, KITA MENGASUMSIKAN EMPAT KEADAAN INDONESIA, DAN BAGAIMANAKAH STRATEGI REFORMASI BIROKRASI APABILA SUATU KEADAAN TERJADI

EMPAT SCENARIO

INDONESIAIAKU
MAJU TERUS,
DEMOKRATIS
(Paradigma Refbir)

- INDONESIAIAKU
JATUH KE TANGAN
RADIKAL AGAMA

INDONESIAIAKU
KE TANGAN
REGIM
OTORITER

INDONESIAIAKU
DISINTEGRASI DAN
FEDERASI

SCENARIO PLANNING 1

SCENARIO 1

Indonesia maju terus paling mungkin terjadi, karena beberapa persyaratan untuk ini mendukung

PERKIRAAN
ARAH

SCENARIO 2,

kembali dikuasai otoritarianisme, agak sulit terjadi, karena rakyat, TNI, partai politik, pimpinan negeri terikat dengan demokrasi

SCENARIO 3,

dikuasai oleh radikalisme agama, sangat sulit, karena pemimpin agama kita termasuk yang moderat dan non radikal

SCENARIO 4,
disintegrasi dan federasi agak sulit, karena NKRI dan Republik harga mati



8 Agenda Reformasi

(sumber : Menpan)

1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan Pemerintahan
2. Penataan Organisasi Kementrian Negara
3. Penataan Organisasi Lembaga Pemerintah Non kementrian
4. Evaluasi dan Penataan Organisasi UPT
5. Evaluasi dan Penataan Satuan Kerja PPK-BLU
6. Penataan Sekretariat Lembaga Negara
7. Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural
8. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Wilayah Reformasi Birokrasi

- Penyempurnaan Undang Undang
- Modernisasi Birokrasi
- Perubahan mindset dan budaya positif
- Restrukturisasi kelembagaan
- Peningkatan kapasitas dan pendidikan aparatur
- Penyederhanaan prosedur, sistem dan mekanisme kerja
- Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif

TRIGER REFORMASI BIROKRASI

ISU DEMOKRATISASI (SEJAK 1999)

ISU GOOD GOVERNANCE (SEJAK 2000)

ISU OTONOMI DAERAH (SEJAK 2001)

ISU SOUNDS GOVENANCE (SEJAK 2008)

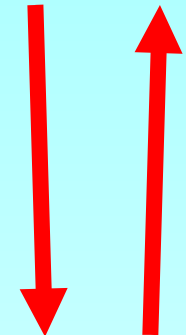
ISU INNOVATIVE GOVERNMENT (SEJAK 2008)

TINGGINYA TUNTUTAN UNTUK EFISIENSI (SEJAK 2003)

VISI MISI PEMERINTAHAN BARU (SEJAK 2004)

KORUPSI DAN TRUST DECLINE (YEARS TO COME)

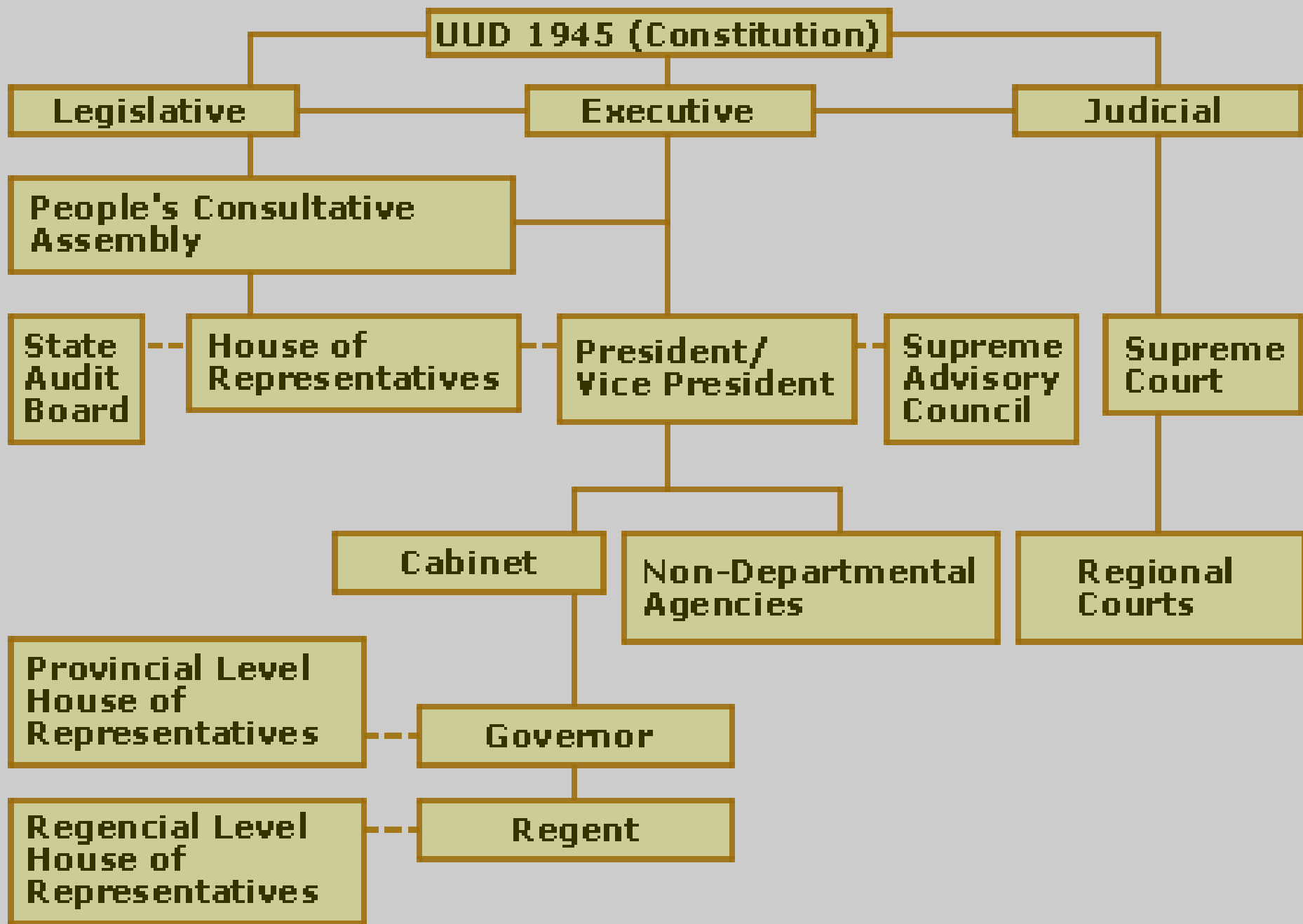
TEORITIS



PRAKTIS

Isu Mutakhir Reformasi Birokrasi

- Dileberative Democracy (Josep Bessette, 1980)
- Innovative Bureaucracy (Alexander Styhre, 2007)
- Sound Governance (Ali Farazman, 2008)
- Citizen Drive Change (Steve Goldsmith, 2009)



JUMLAH DAN JENIS KELEMBAGAAN

KEMENTRIAN - 34
NON KEMENTRIAN - 30
NON STRUKTURAL (KOMISI)
LEMBG PEMBANTU PRESIDEN -97
LEMBAGA PEMDA:
Propinsi 33
Kota/kabupaten) 520



DATA 15 KABUPATEN DENGAN BELANJA PEGAWAI TERBESAR (TAHUN 2010)

NOMOR	NAMA DAERAH	%TOTAL BELANJA APBD	
1.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	76,08%	Sumber :Kemenkeu
2.	Kabupaten Klaten	75,13%	Dikutip dari Media Indonesia
3.	Kabupaten Lampung Tengah	74,57%	Jumat, 8 Oktober 2010
4.	Kabupaten Pringsemu	73,35%	Halaman 4. (diolah kembali)
5.	Kabupaten Boyolali	71,66%	
6.	Kabupaten Purworedjo	71,56%	
7.	Kabupaten Mojokerto	71,24%	
8.	Kabupaten Karanganyar	71,17%	
9.	Kabupaten Tanah Karo	71,04%	
10.	Kabupaten Kulon Progro	70,93%	
11.	Kabupaten Pidie	70,85%	
12.	Kabupaten Magetan	70,83%	
13.	Kabupaten Bireun	70,62%	
14.	Kabupaten Banyumas	70,62%	
15.	Kabupaten Kuningan	70,27%	

Sumber
Prof. Sadu Wasistiono

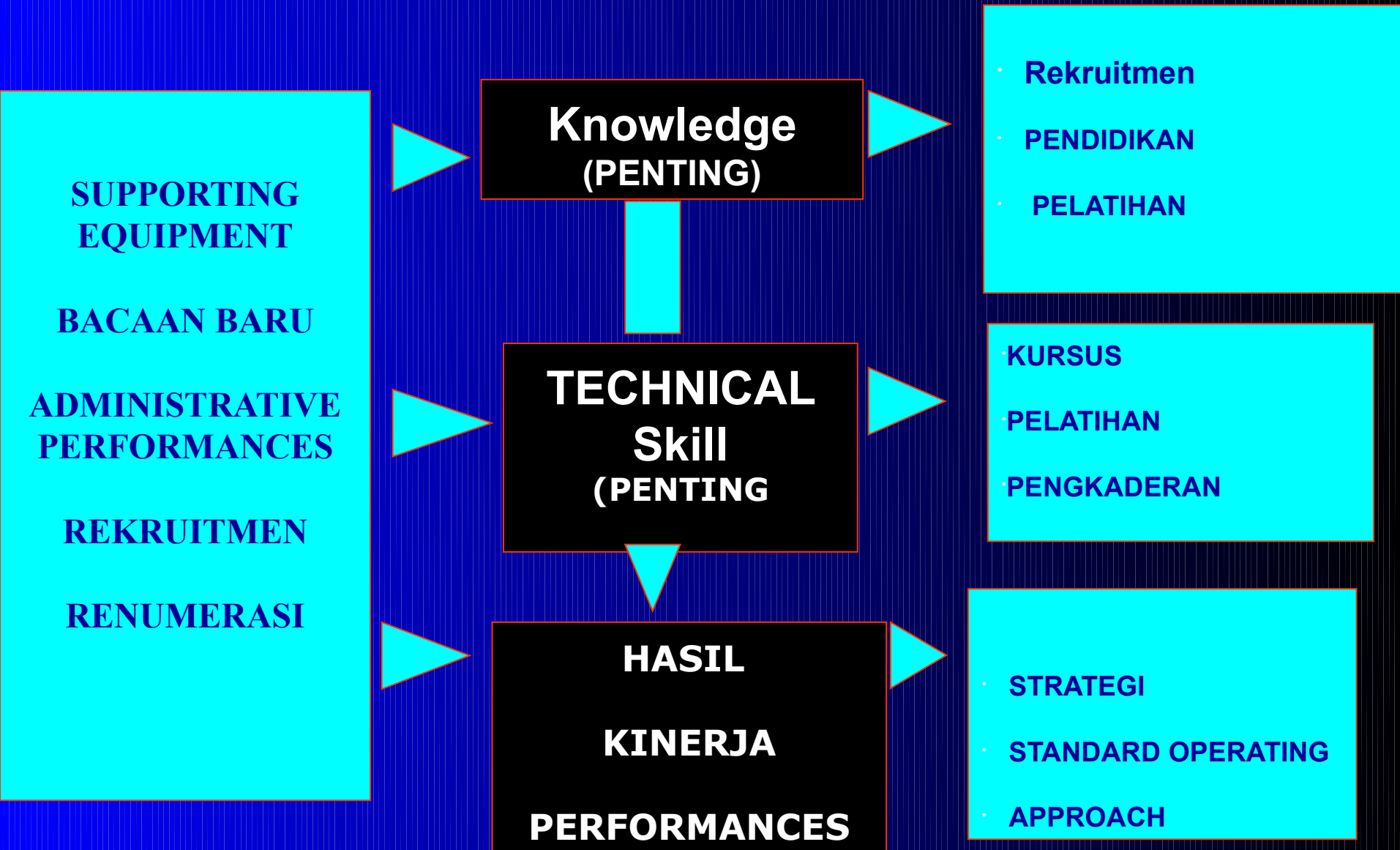
Masalah Reformasi Kelembagaan

- Menurut standar kompetensi
- Politisasi Birokrasi
- Belum validnya Pengukuran Kinerja Individu
- Mekanisme kenaikan pangkat
- Generasi kedua
- Anggaran belanja pegawai jauh diatas belanja publik (dulu rutin max 40%)
- Organisasi pemerintah numpuk
- Lembaga yang tidak butuh muncul
- Dana dekonsentrasi 33 triliun sedang tuas

Kebijakan Reformasi Kelembagaan (Bahan LAN)

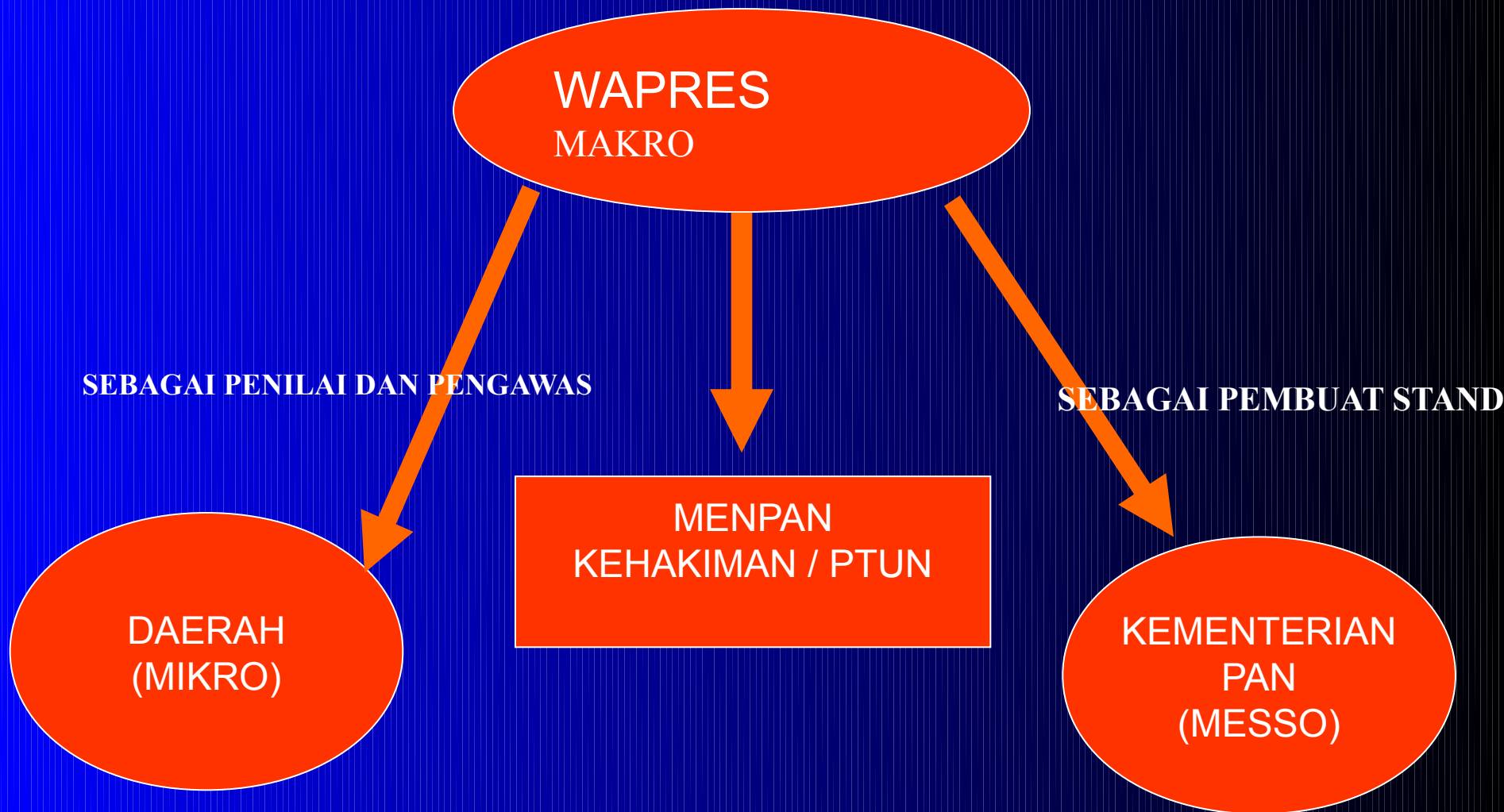
- Undang Undang Kementrian Negara 39/2008
- Urusan Pemerintahan ada 46. (ada nomenklaturnya (3), ruang lingkupnya ada dalam UUD 45 (25), Urusan penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program
- Pengurangan ,Penggabungan kementrian.
- Konsep reformasi kementrian, executing agency, tak ada Menko, independent agency
- Lihat saja beberapa kementrian di negara lain.

SCENARIO PLANNING 1 : PEGAWAI



SCENARIO PLANNING 1

ORGANISASI REFORMASI BIROKRASI



Area perubahan dan hasil yang ingin dicapai

- **KELEMBAGAAN** → ■ **TEPAT FUNGSI , TEPAT UKURAN**
- **BUDAYA KERJA APARATUR** → ■ **BERINTEGRITAS, MORALITAS DAN ETOS KERJA TINGGI**
- **KETATALAKSANAAN** → ■ **SISTEM, PROSES, PROSEDUR , EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR**
- **REGULASI DEREGULASI** → ■ **REGULASI YG TERTIB DAN TIDAK TUMPANG TINDIH**
- **SUMBERDAYA APARATUR** → ■ **SDM PROFESIONAL, NETRAL, SEJAHTERA, PRODUKTIF**
- **PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS** → ■ **TANPA PENYIMPANGAN, AKUNTABEL**
- **PELAYANAN PUBLIK** → ■ **Pelayanan yang berkualitas, mudah, murah**

SISTEM BIROKRASI



Top
Middle level
Street Level Bureaucracy

Silent
revolution

LINGKUNGAN GLOBAL

- advancements in
 - technology,
 - communications,
 - science,
- transportation and
 - industry.

Paradox Birokrasi

Crozier (1964) “Bureaucracy has been described as a system designed by genius to be run by idiots”

- Banyak masalah Kultural. Struktural. Masalah Pesonel. Sistem Rekrutmen. Trust merendah. Pengawasan semu. Korupsi: kesempatan banyak, resiko kecil

PENGUATAN KAPASITAS

- CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI
- CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL
- PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI
- PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS
- CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN

UU, PERPRES DAN PERMENPAN

UNDANG UNDANG:

PELAYANAN PUBLIK

KETERBUKAAN INFORMASI

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ETIKA ADMINSTRASI

PERPRES:

1. **PERPRES TENTANG REFORMASI BIROKRASI**

2. **PERMENPAN TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI**

APARATUR

Rekrutment PNS secara selektif, obyektif dan transparan
Pengangkatan dalam jabatan melalui mekanisme FIT AND
PROPER TEST

Peningkatan kompetensi secara berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan
fungsional

Pengawasan melekat secara bertingkat pada setiap level
kepemimpinan

Mengintensifkan mekanisme REWARD dan PUNISHMENT

Mengintensifkan pembinaan PNS secara intern di masing-
masing instansi

LOCUS BAHASAN / UNIT ANALYSIS

DPRD

KEPALA DAERAH

JABATAN POLITIS

JABATAN KARIR

TECHNO STRUCTURE

MIDDLE LINE

SUPPORT STAFF

BAPPEDA

SEKDA

PERSONIL

KEUANGAN

UMUM

OPERATING CORE

DINAS-DINAS

**PELAYANAN
DASAR**

**SEKTOR
UNGGULAN**

BAGAIMANA KONDISI KINI



Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM

1. Guru Besar Ilmu Pemerintahan – UMM
2. Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia
3. Penulis Buku Birokrasi di Negara Birokratis
4. Peneliti Bidang Pemerintahan

